

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Anggraini, L. (2019). Pwngaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), 45–56.
- Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Di Pulau Sumba. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1878>
- Arifin, S. (2018). *Kajian Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Aspek Kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan)*. Universitas Sebelas Maret.
- Bahl, R. W. (1999). *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform*.
- Bennet, R. (2010). Decentralizing Authority in Post-Suharto Indonesia: The Big Bang Theory, 1998-2010. *Innovations for Successful Societies*, 1–11. http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/data/policy_note/PN_id132/Policy_Note_ID132.pdf
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- BPKP. (2019). *Maturitas SPIP BPKP*. <https://www.bpkp.go.id/spip/konten/4144/Hasil-Penilaian-SPIP.bpkp>
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, (2021).
- Damayanti, R. A. (2011). Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah Dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(2), 149. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i2.2285>
- Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

- Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(12), 4153–4164.
- Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 1–14.
- Evelindasari, L. A. (2020). *Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2018*. Universitas Atma Jaya.
- Fajar, N., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–14.
- Fatimah, S. (2020). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fearon, J. D. (1999). Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance. In *Democracy, Accountability, and Representation* (pp. 55–97). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175104.003>
- Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3013>
- Fontanella, A., & Rossieta., H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*.
- Friyani, R. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Good Governance, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi). *Jurnal Sains Sosiohumaniora*, 1(2), 142–148.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Adams, C. A., & Owen, D. (2014). Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment. In *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* (Vol. 6, Issue 3). Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.1108/sampj-04-2015-0021>
- Gumelar, A. (2021). Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta) The Effect Of Government Internal Control System Maturity On The Performance Of. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 83–93.
- Gusdiana, S. (2020). *Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Halim, A. (2001a). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan* (Edisi Kedu). UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2001b). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2002). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah* (Pertama). UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah* (Edisi Revi). Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan AKuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Halim, A., & Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hamidayanti, L., & Wardani, M. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Dan The 6th Calll for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, (2004).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, (2019).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2022).
- Innocentsa. (2011). Desentralisasi Fiskal Konferensi: Solusi Lokal Untuk Pemulihan Dari Resesi Global. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*.
- Irmawati, F. D. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, dan Kinerja*

Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Ismail, M. F. (2019). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa 2015-2017*. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Iswanto. (2013). *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia)*. Universitas Lampung.
- Jan-Erik Lane. (2000). *The Public Sector Concept, Models and Approaches* (Third Edit). SAGE Publications.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasim, E. Y. (2015). Effect of Government Accountants Competency and Implementation of Internal Control to The Quality of Government Financial Reporting. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 97–105.
- Kathleen M. Eisenhard. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 55–74. <https://doi.org/10.1002/9781118266298.ch7>
- Kelly, R. (1999). Intergovernmental Revenue Allocation Theory and Practice: An Application to Nepal. *Asian Journal of Public Administration*, 21(1), 86–113. <https://doi.org/10.1080/02598272.1999.10800360>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Peraturan Menteri Keuangan 35 (2011).
- Khairudin. (2013). Does Financial Performance of Local Government Influence on The Audit Agency Opinion? *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 4(1).
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara.
- Lestari, K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), 53–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7796>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from

- China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Revisi (Revisi)*. UII Press.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (3rd ed.)*. BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mauli, A., & Rosmiati, M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019. *The 11th Industri Research Workshop and National Seminar*, 866–872.
- Maulida, R. W. A. (2017). *Analisis Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Opini Laporan Keuangan*. Universitas Jenderal Sudirman.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.
- Moisiu, A. (2014). Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 459–463. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.490>
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan Kinerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253.
- Narulita, N. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Perundang Undangan, dan Karakteristik Daerah terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Nasution, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Budget*, 4(2), 141–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.46>
- Nugroho, P. (2017). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. *Info Artha (Jurnal PKN STAN)*, 5, 93–106. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64>

- Nuh, M. S. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41, 50–58. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4159/3792%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4159>
- Nurhidayati, S. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonmi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 128–142.
- Nurmuthmainnah, W. (2020). Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah *Thesis Universitas Hasanuddin*. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/2/A062171003_tesis_20-11-2020 -- 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/2/A062171003_tesis_20-11-2020--1-2.pdf)
- Nursamsia. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 – 2020* [Universitas Muhammadiyah Palopo]. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/1610>
- Nurwati, L., & Ritonga, I. T. (2022). *Analisis Hubungan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Pengelolaan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Di Indonesia)*. Universitas Gajah Mada.
- Nuryawati, L., & Ritonga, I. T. (2022). *Analisis Hubungan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Pengelolaan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Di Indonesia)*. Universitas Gajah Mada.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 186–193.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Pranataningrum, R. A. (2012). *Pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2010*. Universitas Indonesia.

- Pratolo, S., & Diah Irmawati, F. (2020). Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 800. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p20>
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- Puspita, R. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik PEMDA terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website PEMDA*. <https://doi.org/10.7775/rac.v84.i1.7932>
- Rachmat, D. M. (2019). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dengan Kinerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia tahun periode 201*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasmini, N. K., & Masdiantini, P. R. (2018). Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 123–132.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, (2019).
- Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). *Memerangi Korupsi Di Indonesia. Bank Dunia: Justice for the Poor Project, May*.
- Rohyana, C., & Rozaq, R. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *LAND JOURNAL*, 3(2), 60–71.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2017). *Accounting Information System* (Pearson Ed).
- Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Akutansi*, 53(9), 1689–1699.
- Saifudin, A. (2017). *Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Dan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia)*. Universitas Sebelas Maret.
- Saragih, J. P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Jurnal Politica*, 5(2), 200–224.

- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto*. www.pearsoncanada.ca.
- Sedyaningsih, P. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012)* [Universitas Brawijaya]. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5224/1/UPS-QT03885.pdf>
- Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Di Indonesia. In *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Setiyanto, A. (2021). Indonesia's Capital Expenditure and Economic Growth 1990-2020: Role of Accountability. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 245–256. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.653>
- Strom, K. (2003). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. *European Journal of Political Research*, 37, 261–289. Institut
- Subhi, G. N. (2021). *Pengaruh Faktor Keuangan dan Non-Keuangan terhadap Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Sucitra, T. W., & Supriatna, I. (2020). Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia)*. Universitas Sebelas Maret.
- Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453–1481.
- Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.220>

- Syahruddin. (2006). *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi yang Konsisten*. [http://repository.unand.ac.id/23560/1/Download file lengkap dari sini..pdf](http://repository.unand.ac.id/23560/1/Download_file_lengkap_dari_sini..pdf)
- Syaifullah, F. A. (2020). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Mercu Buana.
- Tarihoran, S. N. (2018). *Pengaruh Temuan Audit Bpk, Opini Audit Bpk, Ukuran Pemerintahan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Tim Penulis Badan Kebijakan Fiskal, K. K., Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- Waterman, R. W., & Meier, K. J. (1998). Principal-Agent Models : An Expansion ? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8, 173–202.
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberian Opini atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus pada Kementerian di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 41–52.
- Wijaya, A. H. C., & Akbar, R. (2013). The Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(1), 2013.
- Williams, S. M. (2001). Are Intellectual Capital Performance and Disclosure Practice Related? *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 192–203.
- Wulandari, R. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yuliati, R., Slamet Raharjo, S., & Siswanto, D. (2016). Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government. *International Research Journal of Business Studies*, 9(3), 157–168. <https://doi.org/10.21632/irjbs.9.3.157-168>